

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun terutama di negara berkembang seperti Indonesia, khususnya di Jawa Tengah yang memiliki angka kemiskinan tinggi di tahun 2023. Sehingga menjadi suatu fokus yang sangat penting bagi pemerintahan. Kemiskinan juga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi dalam upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro (2000), bahwa ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Mohini, 2022).

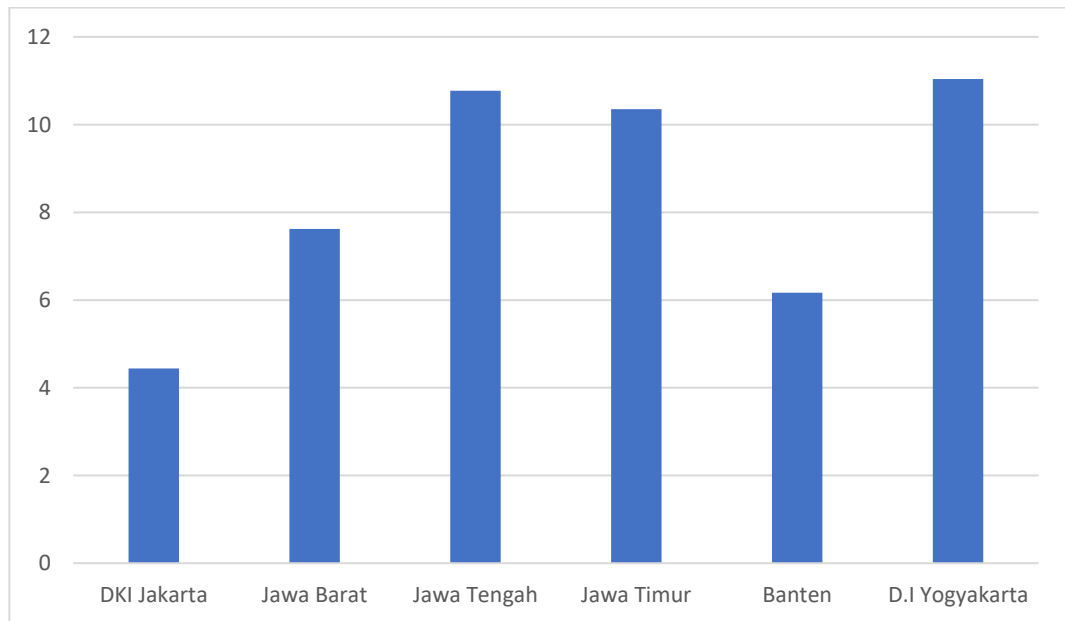
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (Mahendra & Juardi, 2024).

Kemiskinan menjadi kendala yang sering muncul dan bahkan sepanjang sejarah pun tak pernah absen dalam setiap tahunnya, sehingga berbagai langkah upaya yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam teori demokrasi

sosial, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai akibat dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga sebagai hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Oleh karena itu, negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Namun sampai saat ini pemerintah belum memiliki cara dan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, kebijakan atau strategi yang kompeten harus dibuat untuk memperkuat peran dan status perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional serta pengambil kebijakan perlu diperhatikan bersama untuk membedah secara konseptual dan data empirik guna menyatukan pandangan bersama untuk mencari solusi alternatif terhadap upaya memperkecil potensi bertambahnya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Pinontoan (2020) kondisi kemiskinan ini sangat rentan dengan lapangan pekerjaan, ekonomi keluarga, tingkat pendidikan anggota keluarga, terpenuhinya tingkat kesehatannya, kondisi budaya lokal serta kondisi keamanan masyarakat. Selain itu, optimalisasi program pemerintah seperti bantuan sosial untuk masyarakat miskin perlu diperhatikan juga karena sudah menjadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut berikut perbandingan persentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2023.

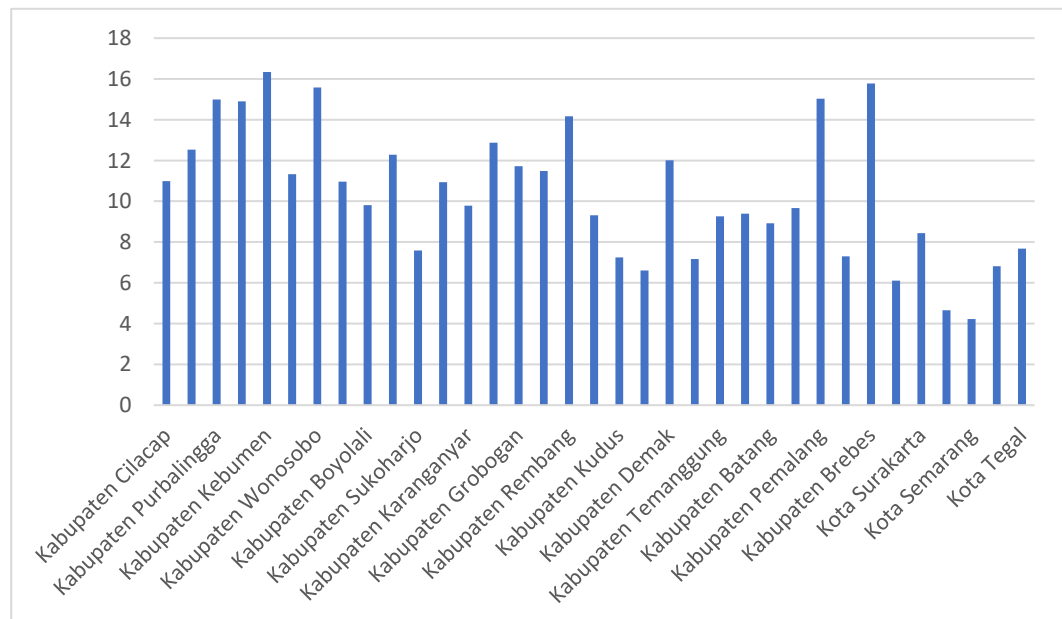


Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2023 (Persen)

(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2024)

Berdasarkan gambar 1.1 Jawa Tengah berada pada urutan tertinggi kedua setelah Provinsi D.I Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,77%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang perlu diperhatikan dan perlu diteliti lebih lanjut baik dari pemerintah atau kampus di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah nilainya diatas 10 persen, maka akan menyebabkan beberapa hal seperti peningkatan ketidakstabilan sosial, kesulitan ekonomi, dan lain-lain.

Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah karena dipengaruhi oleh kondisi di kabupaten atau kota yang ada di dalamnya. Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:



Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 (Persen)

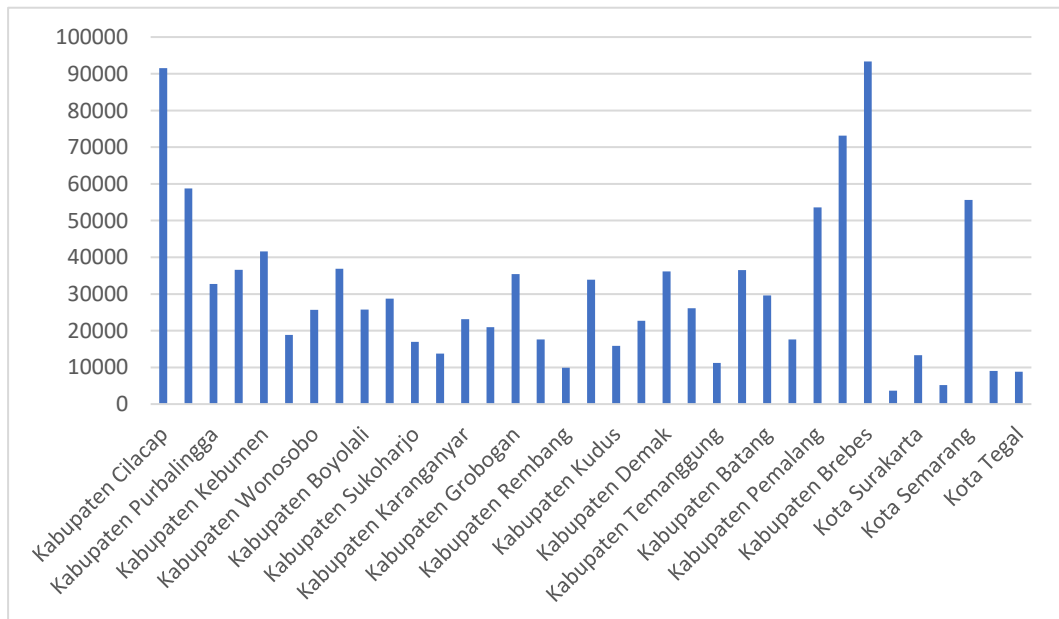
(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2024)

Berdasarkan gambar 1.2 kabupaten atau kota yang berada di Jawa Tengah rata-rata tingkat kemiskinannya berada di atas 10 persen. Kabupaten Kebumen sebagai daerah termiskin di Jawa tengah tingkat kemiskinannya sebesar 16,34%. Pada urutan kedua yaitu Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinannya sebesar 15,78%. Kemudian, Kabupaten Wonosobo pada urutan ketiga dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,58%. Hal ini menunjukkan bahwa parahnya tingkat kemiskinan di kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah sudah berada pada tingkat ekstrem. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, ketimpangan struktur ekonomi dan politik, dan ketidakadilan sosial. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

Pengangguran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan. Tingginya angka pengangguran akan membuat pendapatan masyarakat rendah dan akan menimbulkan adanya kemiskinan. Apabila tingkat pengangguran rendah, maka bisa dipastikan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan mampu mendapatkan kesejahteraan, sehingga pada akhirnya tingkat kemiskinan pun cenderung rendah (Syahputri & Fisabilillah, 2023).

Teori Keynes mengatakan bahwa pengangguran bisa menghambat tercapainya kesejahteraan karena kondisi tersebut membuat seseorang tidak mendapatkan pemasukan. Akibat hal itu, permintaan agregat juga menjadi menurun dan tingkat konsumsi rendah. Tingkat konsumsi yang rendah ini disebabkan oleh penurunan tingkat upah yang membuat daya beli menurun. Produsen ataupun sektor perusahaan akan mengalami kerugian sehingga penyerapan tenaga kerja tidak terjadi dengan baik. Ketika penyerapan tenaga kerja tidak terjadi dengan baik maka jumlah pengangguran meningkat dan membuat seseorang tidak memiliki pekerjaan. Akibatnya pemasukan pun berkurang sehingga seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan rentan menimbulkan kemiskinan (Hasyim, 2016).

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah jumlah pengangguran atau yang tidak mendapatkan pekerjaan dari seluruh angkatan kerja karena mencerminkan proporsi individu yang aktif mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan. Berikut perbandingan pengangguran antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023:



Gambar 1.3 Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 (Jiwa)

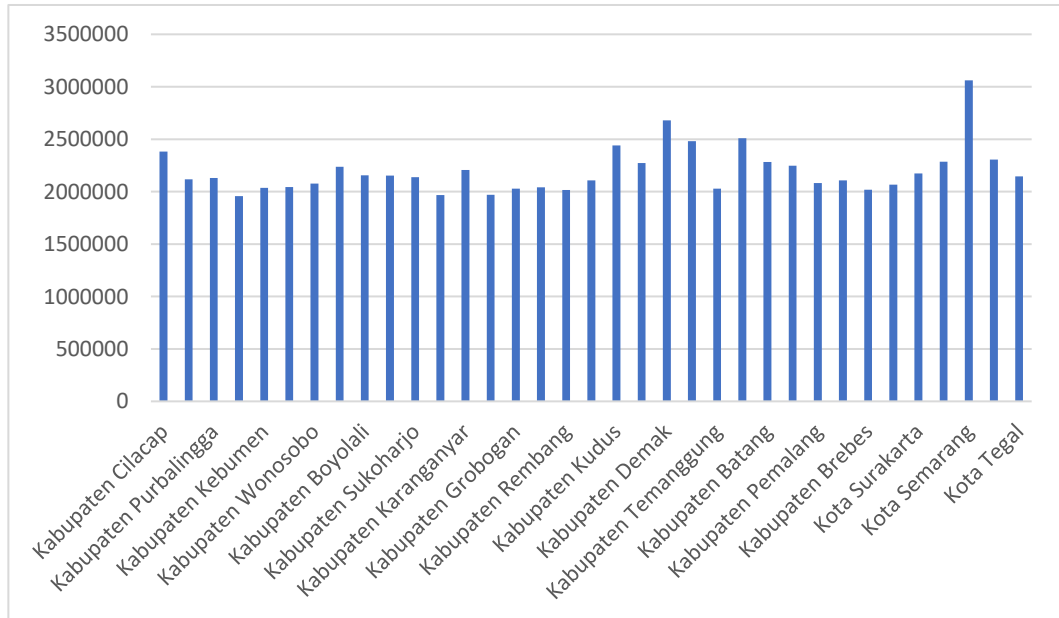
(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2024)

Berdasarkan gambar 1.3 jumlah pengangguran antar daerah di Jawa Tengah mengalami ketimpangan, ini mencerminkan bahwa pemerataan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan alokasi investasi masih belum maksimal. Dapat dilihat pada Kabupaten Brebes jumlah penganggurannya sebesar 93.374 orang, kemudian pada Kabupaten Cilacap menunjukkan sebesar 91.510 orang tidak bekerja, serta pada Kabupaten Tegal menunjukkan sebesar 73.171 orang tidak bekerja. Daerah dengan pengangguran tinggi seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, yang menghambat kemampuan penduduk untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui program-program yang ditawarkan untuk membantu masyarakat dalam bersaing di pasar tenaga kerja seperti pelatihan, pengembangan wirausaha, dan lain sebagainya.

Selain pengangguran, faktor lain yang dapat memengaruhi kemiskinan adalah upah. Upah menjadi bagian terpenting dalam upaya pengentasan kemiskinan karena apabila upah yang diterima oleh masyarakat rendah maka akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat di suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan memengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan oleh pengetahuan dan keterampilan tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya kualitas sumber daya manusia dapat memengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun. Adanya ketentuan kenaikan nilai upah minimum, jumlahnya tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak masyarakat, artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih berkisar di atas jumlah upah minimum (Sari, 2021).

Peneliti memilih upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebagai indikator upah minimum karena lokasi penelitian ini berada pada kabupaten/kota dan UMK mencerminkan kondisi ekonomi lokal dan biaya hidup di masing-masing kabupaten/kota, serta dapat memberikan standar upah yang lebih relevan dan adil

bagi pekerja di daerah tersebut. Berikut perbandingan nilai UMK pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:



Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 (Juta)

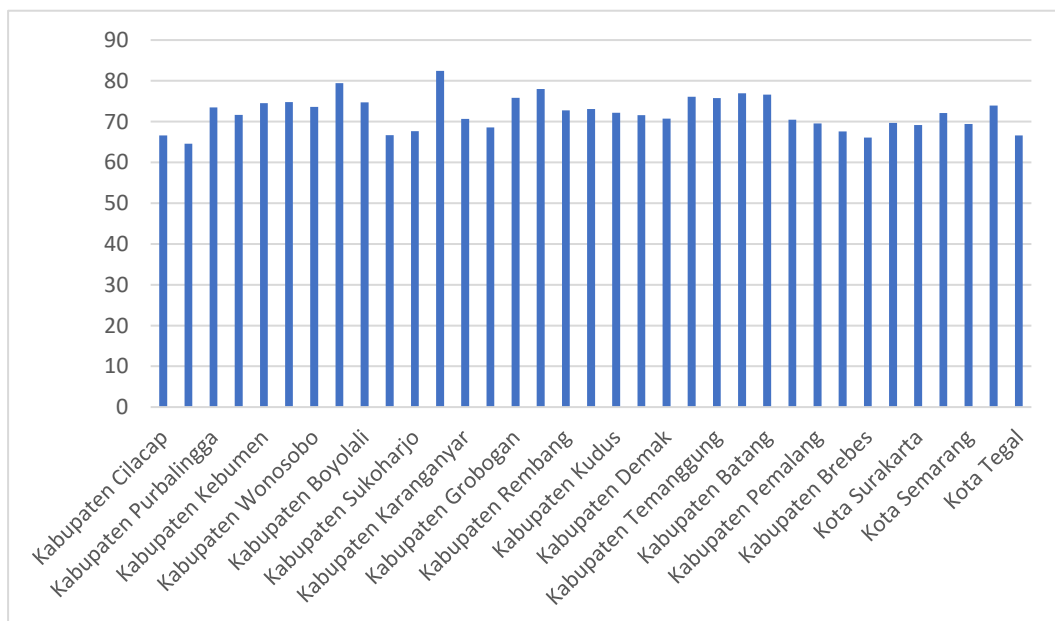
(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2024)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah ini memiliki rata-rata nilai berkisar sebesar Rp. 2.100.000,00. Adapun daerah-daerah yang memiliki UMK tertinggi yaitu pada Kota Semarang sebesar Rp. 3.060.349,00. Pada Kabupaten Demak memiliki UMK sebesar Rp. 2.680.421,00. Kemudian, pada Kabupaten Kendal memiliki UMK sebesar Rp. 2.508.300,00. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah cenderung tinggi karena UMK yang relatif rendah mencerminkan kemampuan ekonomi yang terbatas, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan UMK yang rendah daya beli masyarakat juga

menurun, maka akan berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial di daerah tersebut.

Faktor lain yang memengaruhi kemiskinan yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan lapangan kerja maupun semua jenis pekerjaan yang telah tersedia bagi tenaga kerja guna memenuhi kebutuhannya. Semakin banyak orang yang telah bekerja maka kesempatan kerja akan semakin luas. Maka terjadi peningkatan pendapatan dan mampu mengurangi kemiskinan. Kesempatan mempunyai pengertian yaitu kesempatan yang tersedia bagi pekerja dari suatu kegiatan ekonomi, demikian kesempatan kerja dapat pula diartikan sebagai partisipasi pembangunan (Nurainah, 2019). Namun ketika kesempatan kerja terbatas, pendapatan masyarakat cenderung rendah yang berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan.

Peneliti memilih Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai indikator kesempatan kerja karena TPAK mengukur persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif dalam angkatan kerja, mencerminkan ketersediaan tenaga kerja dalam suatu ekonomi. Semakin tinggi TPAK, semakin besar pasokan tenaga kerja yang tersedia, yang menunjukkan adanya lebih banyak kesempatan kerja. Berikut grafik tingkat partisipasi angkatan kerja menurut kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2023:



Gambar 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kab/Kota Jawa Tengah 2023 (Persen)

(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2024)

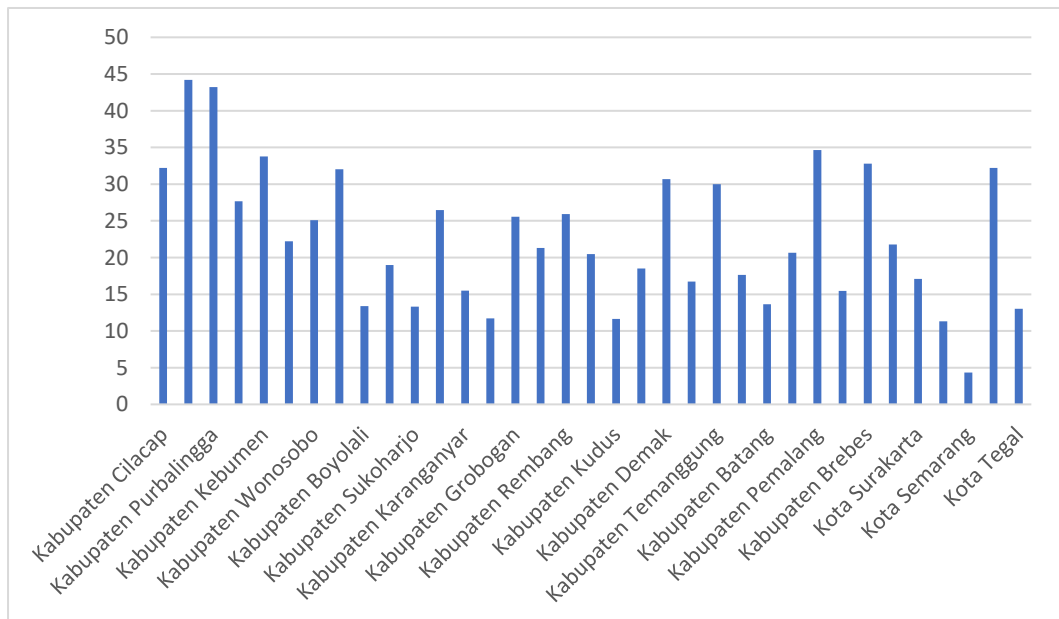
Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat bahwa nilai terendah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 64,6 yaitu pada Kabupaten Banyumas. Kemudian nilai TPAK Kabupaten Cilacap sebesar 66,6. Dan pada Kota Tegal nilai TPAK nya sebesar 66,64. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut apabila dibandingkan dengan daerah lain masih dikatakan rendah dalam mencerminkan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Dapat diketahui bahwa rata-rata setiap daerahnya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja berkisar 70%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja aktif dalam mencari pekerjaan, yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun pada penelitian (Putri & Effendi, 2021) menyebutkan bahwa variabel kesempatan kerja

menunjukkan pengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Banjarmasin. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Namun hubungannya tidak signifikan artinya efeknya tidak cukup besar atau konsisten untuk diterima sebagai bukti yang meyakinkan.

Indikator selanjutnya adalah bantuan sosial, bantuan sosial diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah. Bantuan sosial merupakan program yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta membantu masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan untuk bertahan hidup. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Tahun 2012 menyatakan bahwa, bantuan sosial (bansos) merupakan bantuan yang berjenis transfer uang, barang atau jasa yang dilakukan pemerintah pusat/daerah untuk masyarakat yang bertujuan melindungi masyarakat dari peluang terjadinya masalah sosial dan dapat menaikkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan umum masyarakat (Awaliyah, M. et al., 2024).

Peneliti memilih persentase rumah tangga penerima program bantuan pangan sebagai indikator bantuan sosial karena program bantuan pangan langsung kepada keluarga berpendapatan rendah, seperti beras 10 kilogram per bulan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran. Program ini berkontribusi langsung terhadap pemenuhan gizi, yang penting untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berikut grafik persentase rumah tangga penerima program bantuan pangan menurut kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023:



Gambar 1.6 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Bantuan Pangan Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2023 (Persen)
(Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2024)

Menjelaskan perbandingan rumah tangga penerima program bantuan pangan di setiap daerahnya memiliki persentase yang berbeda-beda. Dengan hal ini bisa dikatakan daerah yang memiliki persentase penerima bantuan sosial yang lebih tinggi memiliki karakteristik sosio-ekonomi yang lebih sulit seperti struktur penduduk, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi regional sehingga mereka membutuhkan program bantuan pangan ini untuk membantu memulihkan perekonomian di daerah tersebut.

Berdasarkan gambar 1.6 persentase penerima program bantuan pangan tertinggi pada Kabupaten Banyumas sebesar 44,2. Pada Kabupaten Purbalingga persentasenya sebesar 43,21. Kemudian, pada Kabupaten Pemalang persentasenya sebesar 34,63. Dari beberapa daerah tersebut yang memiliki persentase tertinggi

dibandingkan daerah lainnya, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut perlu mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dengan adanya program bantuan pangan ini daerah tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan gizi, serta membantu memulihkan perekonomian.

Berdasarkan pada uraian yang sudah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian perihal **“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah: Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Tahun 2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kondisi pengangguran, upah minimum, kesempatan kerja, bantuan sosial, dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagaimana pengaruh pengangguran, upah minimum, kesempatan kerja, dan bantuan sosial secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bagaimana pengaruh pengangguran, upah minimum, kesempatan kerja, dan bantuan sosial secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi tersebut, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kondisi pengangguran, upah minimum, kesempatan kerja, bantuan sosial, dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengaruh pengangguran, upah minimum, kesempatan kerja, dan bantuan sosial secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengaruh pengangguran, upah minimum, kesempatan kerja, dan bantuan sosial secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan kegunaan:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan serta wawasan baik itu secara teoritis maupun empiris. Sehingga peneliti dapat menemukan perbandingan antara teori dan kenyataan langsung yang terjadi di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam studi-studi mendatang, baik dalam konteks akademis maupun praktis.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan, dengan fokus pada faktor-faktor yang terbukti berpengaruh. Serta, membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program-program yang ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.

3. Kontribusi Ilmiah

Hal baru dalam penelitian ini adalah penggunaan variabel bantuan sosial yang selama ini belum banyak diteliti. Dalam hal ini variabel bantuan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya penerima bantuan sosial akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di Jawa Tengah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah kemiskinan di Jawa Tengah peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS pusat dan BPS Provinsi Jawa Tengah.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat dalam bentuk matriks dan direncanakan mulai Oktober 2024 s.d April 2025. Demi terlaksananya penelitian dengan sesuai rencana maka penulis membuat jadwal penelitian. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

[illegible]

